



PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI JEMAAH HAJI INDONESIA TAHUN 2025

Eva Mutia Ghofarany* dan Rahmi Yuningsih**

Abstrak

Pelayanan kesehatan haji menjadi fokus penting dalam upaya perlindungan kesehatan jemaah, terutama bagi kelompok risiko tinggi yang mendominasi kuota haji Indonesia. Meskipun angka kematian jemaah menurun dari 773 jiwa pada 2023 menjadi 461 jiwa pada 2024, namun masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan seperti tingginya proporsi jemaah lansia, terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, serta rendahnya kesadaran menjaga kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pelayanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan haji, Komisi IX DPR RI dapat mendorong adanya regulasi tentang rasio minimal tenaga kesehatan dan jumlah minimal tenaga kesehatan untuk setiap bidang spesialisasi pada pelayanan kesehatan haji. Komisi IX DPR RI juga dapat mendukung percepatan integrasi Siskohatkes dengan Satu Sehat sebagai basis data kesehatan. Komisi IX DPR RI dapat mendorong kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan edukasi jemaah haji mengenai pentingnya pengelolaan penyakit penyerta dan penerapan perilaku hidup sehat, baik melalui pendekatan kesehatan maupun keagamaan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yaitu lebih dari 229 juta jiwa. Dengan penduduk mayoritas muslim, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jemaah haji terbanyak. Tahun 2024, dari total 1,8 juta jemaah haji, sebanyak 241.000 merupakan jemaah haji asal Indonesia. Sedangkan pada tahun 2025, terdapat 221.000 jemaah haji asal Indonesia (Ramadhani, 2025). Dari jumlah tersebut, terdapat 47.384 atau 22% jemaah haji lansia. Sedangkan pada tahun 2024, proporsi jemaah haji lansia mencapai 37%. Dari jumlah tersebut, jemaah haji lansia yang memiliki risiko tinggi penyakit komorbid sebanyak 73% (Kemenkes, 2025a).

Jemaah haji lansia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan hingga menyebabkan kematian selama melaksanakan ibadah haji. Penyebabnya antara lain perbedaan kondisi geografis dan iklim antara Indonesia dan Arab Saudi. Hal ini tercermin dari data jumlah kematian jemaah haji Indonesia beberapa tahun terakhir yaitu, 342 jiwa (2016), 350 jiwa (2018), 447 jiwa (2019), 773 jiwa (2023), dan 461 jiwa (2024) (Kemenkes, 2022; Hamida,

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: eva.ghofarany@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: rahmi.yuningsih@dpr.go.id

2024; Kristina, 2024). Hingga pertengahan bulan Mei 2025, jumlah kematian sebanyak 28 jiwa. Mayoritas kasus kematian jemaah haji disebabkan oleh penyakit jantung (Hawari, 2025).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat pelayanan kesehatan haji terutama untuk menurunkan angka kematian pada kelompok lansia dan risiko tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pelayanan kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Faktor Risiko dan Penyebab Kematian Jemaah Haji

Pelaksanaan ibadah haji memerlukan kondisi fisik dan mental yang sehat (*istithaah*). Sebelum keberangkatan, jemaah haji harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat mayoritas faktor risiko tinggi pada jemaah haji seperti hipertensi, kolesterol tinggi, aritmia, gangguan jantung, dan pencernaan. Faktor risiko tersebut meningkatkan morbiditas pada jemaah haji. Meskipun sebelum keberangkatan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan, namun masih terdapat kasus morbiditas dan mortalitas pada jemaah haji. Data Kementerian Kesehatan (2024) menunjukkan bahwa terdapat lima penyakit terbanyak yang ditangani di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan Madinah, yaitu pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, gagal jantung, hipertensi, dan diabetes.

Adapun kasus kematian jemaah haji umumnya terjadi mulai di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta mencapai puncaknya setelah Armuzna. Tingginya aktivitas fisik selama ibadah di Armuzna menyebabkan jemaah haji mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi semakin diperburuk dengan adanya faktor risiko tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 417 kematian per 100.000 jemaah haji kelompok risiko tinggi, sedangkan kelompok non-risiko tinggi hanya 101 per 100.000 jemaah. Data ini menunjukkan bahwa kelompok risiko tinggi lebih rentan terhadap kondisi ekstrem pada saat haji. Kondisi ini diperburuk oleh faktor usia, penyakit penyerta, keterbatasan adaptasi terhadap perubahan suhu dan aktivitas fisik berat (Febriyanti & Adisasmata, 2023). Tingginya angka ini berkaitan erat dengan meningkatnya jumlah lanjut usia dengan penyakit penyerta. Kendali penyakit penyerta menjadi penting dilakukan jauh sebelum keberangkatan untuk menurunkan risiko komplikasi dan kematian.

Kebijakan dan Inovasi Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2025

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama telah menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025. *Pertama*, alur pemeriksaan kesehatan berbeda dari tahun 2023 yang dilakukan setelah jemaah haji melunasi biaya haji sehingga hasil pemeriksaan tidak memengaruhi keberangkatan. Pada tahun 2025, pemeriksaan kesehatan sebelum penetapan *istithaah* dan pelunasan biaya haji. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2118

Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji, pemeriksaan kesehatan dalam penetapan *istithaah* tidak hanya meliputi evaluasi medis umum, tetapi juga mencakup penilaian kesehatan mental, kemampuan kognitif, serta kemampuan aktivitas harian khusus bagi jemaah lansia. Riwayat kesehatan jemaah haji juga dianalisis melalui rekam medis. Hanya jemaah yang dinyatakan memenuhi syarat *istithaah* yang diperbolehkan melunasi biaya haji dan diberangkatkan ke tanah suci. Perubahan ini menunjukkan adanya pendekatan preventif dan promotif dalam perlindungan kesehatan jemaah haji, dan terbukti menurunkan angka kematian jemaah haji di tahun 2024.

Kedua, pelayanan kesehatan haji 2025 diperkuat dengan adanya integrasi sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan (Siskohatkes) dengan platform “Satu Sehat”. Penguatan digitalisasi ini memungkinkan akses dan pemantauan data kesehatan jemaah haji secara *real time* melalui rekam medis elektronik (RME). Pengintegrasian juga dilakukan dengan *international patient summary* untuk memudahkan akses riwayat kesehatan jemaah haji oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi. Inovasi di bidang digitalisasi ini memudahkan petugas melacak riwayat kesehatan jemaah sejak di tanah air hingga di Arab Saudi (Fadhil, 2025; Kemenkes, 2025a).

Ketiga, pembinaan kesehatan jemaah haji sejak masa tunggu melalui skrining dan edukasi kesehatan secara berkelanjutan. *Keempat*, Kementerian Kesehatan terus meningkatkan kapasitas tim pemeriksa kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. *Kelima*, Kementerian Kesehatan memperkuat layanan kesehatan di Arab Saudi dengan menempatkan pos kesehatan di hotel, menugaskan dokter spesialis dan tenaga promosi kesehatan di setiap sektor, serta melengkapi fasilitas KKHI dengan alat medis (Kemenkes, 2025a). *Keenam*, mulai tahun 2025 Kementerian Agama mewajibkan seluruh jemaah haji menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Hawari, 2025). Kebijakan ini untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan jemaah haji, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kembali dari haji.

Tantangan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2025

Meski berbagai inovasi kebijakan telah diterapkan, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan haji tahun 2025 masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingginya proporsi jemaah dari kelompok risiko tinggi (Kemenkes, 2025a). Lamanya masa tunggu keberangkatan menjadikan dominasi kelompok ini sulit dihindari. Walaupun penetapan *istithaah* telah diperketat, penurunan kondisi jemaah tetap terjadi akibat kelelahan dan paparan panas ekstrem. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan preventif dan promotif melalui edukasi gaya hidup sehat serta pengelolaan penyakit penyerta sejak jauh hari sebelum keberangkatan.

Tantangan lain adalah keterbatasan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jumlah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bidang kesehatan menurun dari 284 orang

pada 2024 menjadi 192 orang pada 2025. Sementara itu, idealnya dibutuhkan minimal 320 orang tenaga medis dan tenaga kesehatan (Kemenkes, 2024). Pada tahun 2024, beberapa bidang pelayanan seperti radiologi, kedokteran gigi, dan psikologi hanya memiliki satu tenaga kesehatan. Idealnya setiap bidang pelayanan memiliki lebih dari satu orang agar dapat bekerja secara bergantian. Kondisi serupa masih terjadi pada tahun 2025, beberapa bidang spesialisasi masih diisi oleh satu orang (Kemenkes, 2025b). Menyikapi hal ini, PPIH bidang Kesehatan melakukan pengaturan ulang lokasi tugas dokter spesialis di sektor tertentu agar pelayanan tetap optimal.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan haji tidak akan optimal tanpa kesadaran jemaah untuk menjaga kesehatannya sendiri. Banyak kasus kematian terjadi karena jemaah terlambat melapor atau enggan dirujuk ke fasilitas kesehatan. Selain itu, keyakinan bahwa wafat di Tanah Suci merupakan sebuah kemuliaan membuat sebagian jemaah kurang memperhatikan kondisi kesehatannya (Kemenag, 2024). Oleh karena itu, diperlukan edukasi bagi jemaah haji mengenai pentingnya menjaga kesehatan (pentingnya hidrasi, istirahat, dan mengenali gejala penyakit), serta cara mengakses pelayanan kesehatan terdekat. Edukasi juga perlu dilengkapi dengan pendekatan keagamaan yang menekankan bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab setiap muslim.

Penutup

Berbagai kebijakan strategis telah diterapkan dalam pelayanan kesehatan haji 2025 seperti perbaikan alur pemeriksaan kesehatan, penguatan digitalisasi, pembinaan kesehatan, dan peningkatan sumber daya. Namun masih terdapat beberapa tantangan, seperti tingginya proporsi jemaah risiko tinggi, keterbatasan tenaga kesehatan, serta rendahnya kesadaran jemaah haji dalam menjaga kesehatan. Komisi IX DPR RI dapat mendorong adanya regulasi tentang rasio minimal tenaga kesehatan dan jumlah minimal tenaga kesehatan untuk setiap bidang spesialisasi pada pelayanan kesehatan haji. Komisi IX DPR RI juga dapat mendukung percepatan integrasi Siskohatkes dengan Satu Sehat sebagai basis data kesehatan. Komisi IX DPR RI dapat mendorong kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan edukasi jemaah haji mengenai pentingnya pengelolaan penyakit penyerta dan penerapan perilaku hidup sehat, baik melalui pendekatan kesehatan maupun keagamaan.

Referensi

- Fadhil, H. (2025, Mei 14). Begini cara kemenkes pantau kesehatan jemaah haji RI selama di Saudi. *Detiknews.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7914480/begini-cara-kemenkes-pantau-kesehatan-jemaah-haji-ri-selama-di-saudi>
- Febriyanti, N., & Adisasmita, A. C. (2023). Trend epidemiologi kematian jemaah haji Indonesia tahun 2017-2023. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 7(2), 4. <https://doi.org/10.7454/epidkes.v7i2.1082>

- Hamida, S. R. (2024, Juni 2023). Inilah 5 negara dengan jumlah jemaah haji yang meninggal paling banyak. *Tempo.co* <https://www.tempo.co/internasional/inilah-5-negara-dengan-jumlah-jemaah-haji-yang-meninggal-paling-banyak-46612>
- Hawari, H. (2025, Februari 12). Kemenag: Jemaah haji 2025 wajib punya BPJS kesehatan yang aktif. *Detik.com*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7775546/kemenag-jemaah-haji-2025-wajib-punya-bpjs-kesehatan-yang-aktif>
- Kementerian Agama. (2024, Juni 11). Berharap mati saat berhaji dan jihad fi sabilillah. *Malangkota.go.id*. <https://kemenag.malangkota.go.id/showNews?head=berharap-mati-saat-berhaji-dan-jihad-fi-sabilillah>
- Kementerian Kesehatan. (2022, Agustus 13). Intervensi kementerian kesehatan dalam menurunkan kematian jemaah haji. *Kemkes.go.id*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220813/4340928/intervensi-kementerian-kesehatan-dalam-menurunkan-kematian-jemaah-haji/>
- Kementerian Kesehatan. (2024, Juli 23). Evaluasi kesehatan haji 2024 dari kecukupan obat hingga sdm kesehatan. *Kemkes.go.id*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20240726/1446100/evaluasi-kesehatan-haji-2024-dari-kecukupan-obat-hingga-sdm-kesehatan/>
- Kementerian Kesehatan. (2025a, April 17). Wujudkan haji ramah lansia dan disabilitas 1446H/2025M, ini kebijakan strategis kemenkes dalam penyelenggaraan kesehatan haji. *Kemkes.go.id*. <https://kemkes.go.id/id/wujudkan-haji-ramah-lansia-dan-disabilitas-1446h-2025m-ini-kebijakan-strategis-kemenkes-dalam-penyelenggaraan-kesehatan-haji>
- Kementerian Kesehatan. (2025b, April 29). Persiapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025. [Bahan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI Bersama Kemenkes]. Komisi IX DPR RI.
- Kristina, (2024, Juli 23). Angka kematian jemaah haji 2024 turun dibanding tahun lalu. *Detik.com*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7453417/angka-kematian-jemaah-haji-2024-turun-dibanding-tahun-lalu>.
- Ramadhani, Z. (2025, April 2029). Simak jadwal lengkap ibadah haji 2025 dari kementerian agama. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/simak-jadwal-lengkap-ibadah-haji-2025-dari-kementerian-agama-1284>